

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Kurikulum 2013

##### 1. Pengertian Kurikulum 2013

Istilah *kirikulum* memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat dan pandangan diri pakar yang bersangkutan.

Istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari kata *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga.<sup>1</sup> Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari *start* dan *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (*subject*) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.

Atas dasar ini, maka inti kurikulum adalah pengalaman belajar. Ternyata pengalaman belajar yang banyak berpengaruh dalam pendewasaan anak, tidak hanya mempelajari mata pelajaran interaksi sosial di lingkungan sekolah, kerja sama dalam kelompok, interaksi dalam lingkungan fisik, dan lain-lain, juga merupakan pengalaman belajar.<sup>2</sup>

Berikut ini beberapa pengertian kurikulum menurut para pakar, yaitu:

- a. Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum sebagai *the total effort of the school situations*, artinya bahwa kurikulum merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum & Pembelajaran*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), 2.

<sup>2</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 162

- b. Smith memandang kurikulum sebagai seperangkat dan upaya pendidikan yang bertujuan agar peerta didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Anak didik dibina agar memiliki kemampuan menyesuaikan diri untuk menjadi bagian dari masyarakat.
- c. Harold Rugg mengartikan kurikulum sebagai program sekolah yang didalamnya terdapat semua peserta didik dan pekerjaan guru-guru mereka.
- d. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah suatu kegiatan dan pengalaman peerta didik di sekolah yang sudah direncanakan.<sup>3</sup>
- e. Menurut Ali Muhammad al-Khawli adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.
- f. Menurut Muhammad Omar Muhammad al Thoumy al Syaibany, kurikulum pendidikan Islam dikenal dengan istilah manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.<sup>4</sup>

Pandangan lama atau pandangan tradisional mengemukakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah.<sup>5</sup> Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 yang merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006.<sup>6</sup> Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 adalah adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi

---

<sup>3</sup> Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 176-177

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan islam: Pada periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 122

<sup>5</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

<sup>6</sup> M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 16.

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.<sup>7</sup> Ilmu pengetahuan selalu berubah dan berkembang, demikian juga bidang pendidikan. Perubahan dalam bidang pendidikan membawa pengaruh terhadap perubahan pandangan mengenai kurikulum.<sup>8</sup>

Kurikulum 2013 ini diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan: a) observasi, b) bertanya (wawancara), c) bernalar, dan d) mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran.

Adapun obyek pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. Memasuki masa depan yang lebih baik.

---

<sup>7</sup> M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, 16.

<sup>8</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 2.

Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah atau pun madrasah yang sudah siap melaksanakannya. Pada tahun pelajaran 2013/2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk Kelas I dan IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Kelas X Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK). Pada tahun pelajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII.

Guru memegang peranan sangat vital dalam kesuksesan pembelajaran. Guru dipandang dapat memainkan peran penting terutama peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu dan sebagainya.<sup>9</sup> Menjelang implementasi Kurikulum 2013, penyiapan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana kurikulum di lapangan perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), telah menyiapkan strategi pelatihan implementasi Kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Pada tahun 2013 pelatihan dilakukan bagi pengawas SD/SMP/SMA/SMK, kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK, dan guru Kelas I dan IV SD, guru Kelas VII SMP, dan guru Kelas X SMA/SMK. Guna menjamin kualitas pelatihan tersebut, maka BPSDMPK dan PMP telah menyiapkan 14 modul pelatihan implementasi Kurikulum 2013, sesuai dengan kelas, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan. Modul ini diharapkan dapat membantu semua pihak menjalankan tugas dalam pelatihan implementasi Kurikulum 2013.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses

---

<sup>9</sup> Imas Kurniasih & Berlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 (Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Kata Pena, 2014), 13.

berkembangnya potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi;

- a. manusia berkualitas yang mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
- b. manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
- c. warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Tujuan kurikulum 2013 secara khusus meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan *hard skills* dan *soft skills* melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.<sup>11</sup> Pelaksanaan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, sesuai dengan kompetensi inti pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.<sup>12</sup> Karakter adalah nilai yang unik baik yang terpatrit dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Sedangkan Scerenko menyatakan bahwa karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa.<sup>13</sup>

Mengacu dari berbagai pengertian dan definisi karakter tersebut, maka karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar positif yang dimiliki seseorang, yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Dalam pengertian sederhana pendidikan

---

<sup>10</sup> Muhammad Nuh, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2103*, (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2013), 72.

<sup>11</sup> M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, 25.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 445.

<sup>13</sup> Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 42.

karakter adalah hal positif yang yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada peserta didik yang diajarnya.

Di dalam QS. Luqman ayat 12 diterangkan bahwa Luqman memberi nasehat kepada anaknya dengan ilmu hikmah (karakter)<sup>14</sup> yang berbunyi:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ

فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Luqman: 12).<sup>15</sup>

Karakter adalah gambaran tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan melekat pada diri seseorang. Orang yang berkarakter memiliki berbagai dimensi. Misalnya, dimensi sosial, fisik, emosi, dan akademik. Jika disejajarkan dengan ranah Bloom, berarti manusia berkarakter memiliki ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik yang baik, ditambah dengan emosi,

<sup>14</sup> Penjelasan ayat tersebut di dalam tafsir al-Munir karya Imam Nawawi al-Bantani juz 1 halaman 170 dan di dalam tafsir al-Kabir karya Imam Fahrurrozi juz 25 halaman 127 bahwa Luqman diperintah oleh Allah agar syukur kepada Allah karena diberi hikmah oleh Allah. Arti dari hikmah itu sendiri adalah diberi amal kekuatan beramal sesuai dengan ilmu. Barangsiapa yang diberi kekuatan amal sesuai dengan ilmu maka orang tersebut dianugerahi hikmah. Namun mengerti sesuatu tapi tidak mengerti bahwa sesuatu tersebut *masalah* atau *mafsadat* maka tidak bisa dinamakan orang tersebut mendapatkan hikmah. Dalam hal ini manusia dibagi menjadi dua, yang pertama apabila dia mengetahui sesuatu ada yang lebih penting kemudian dia melakukan hal yang lebih penting dan sesuai dengan ilmu maka orang tersebut diberi hikmah. Yang kedua apabila yang dilakukan itu tidak yang lebih penting dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ilmu maka orang tersebut tidak diberi hikmah.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982), 654.

spiritual, ketahanan menghadapi masalah dan sosial. Dengan demikian, perpaduan dua basis antara kompetensi dan karakter dalam kurikulum ini diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Winton mendefinisikan pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya.<sup>16</sup> Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari).

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.<sup>17</sup> Sedangkan Fakry Gaffar menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.<sup>18</sup> Jadi, pendidikan karakter adalah proses pengarahan dan pembimbingan terhadap peserta didik agar memiliki nilai dan berperilaku yang baik, untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk mengefektifkan

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982), 43.

<sup>17</sup> Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982), 45.

<sup>18</sup> Dharma Kesuma, *et. al, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktiknya di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

program pendidikan karakter dan meningkatkan kompetensi dalam kurikulum 2013 diperlukan koordinasi, komunikasi dan jalinan kerja antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam semua sisi.

## 2. Landasan Kurikulum 2013

Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013.

### a. Landasan Filosofis

- 1) Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan.
- 2) Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.

### b. Landasan Yuridis

Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Beberapa landasan yuridis dari Undang-Undang sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
- 4) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141)
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142)<sup>19</sup>
  - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013
  - 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan<sup>20</sup>
  - 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan

---

<sup>19</sup>Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013

<sup>20</sup>Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah struktur Kurikulum.<sup>21</sup>

c. Landasan Konseptual

Adapun landasan konseptual pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai berikut; 1) Relevansi pendidikan; 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; 3) Pembelajaran kontekstual; 4) Pembelajaran aktif; dan 5) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.<sup>22</sup>

d. Landasan Teoritis

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Kompetensi Inti. Kompetensi tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan.

e. Landasan Empiris

Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia, namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat, atau bahkan mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta

---

<sup>21</sup>Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013

<sup>22</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 65.

didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang.

Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan.

**3. Struktur Kurikulum 2013**

Struktur Kurikulum SMP/MTs terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Khusus untuk MTs, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Stuktur kurikulum 2013 SD/MI adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Struktur Kurikulum 2013<sup>23</sup>**

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Belajar Per Minggu		
		Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
<b>Kelompok A (Umum)</b>				
1	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
4	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
<b>Kelompok B (Umum)</b>				
1	Seni Budaya	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3

<sup>23</sup>Permendikbud No. 35 Tahun 2018

3	Prakarya dan/atau Informatika	2	2	2
Jumlah Jam Per Minggu		38	38	38

Keterangan:

1. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
2. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
3. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
4. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah.
5. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.
6. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
7. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah, maksimal 2 (dua) jam/minggu.
8. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
9. Untuk Mata Pelajaran Prakarya dan/atau Mata Pelajaran Informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran yaitu Mata Pelajaran Prakarya atau Mata Pelajaran Informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan.
10. Dalam hal satuan pendidikan memilih Mata Pelajaran Prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta

didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.

11. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama.
12. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan.

#### **4. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013**

Tujuan pengembangan Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bagian umum dikatakan, bahwa:

“Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: ....., 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, .... dan pada penjelasan Pasal 35, bahwa “Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang

telah disepakati”. Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk ”Melanjutkan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu”.<sup>24</sup>

Sementara tujuannya menurut Permenag Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.<sup>25</sup> Mengenai tujuan Kurikulum 2013, secara khusus Fadlillah<sup>26</sup> menguraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan *hard skills* dan *soft skills* melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang,
- b. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.
- c. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.
- d. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

---

<sup>24</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 65.

<sup>25</sup> Permenag Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013

<sup>26</sup> M. Fadillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 25.

Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai dengan satuan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan potensi daerah.

## 5. Fungsi Kurikulum 2013

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum 2013 yaitu:<sup>27</sup>

- a. Fungsi Penyesuaian (*the adjust fine of adaptive function*)  
Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan anak didik agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan social. Sebagai makhluk Allah, anak didik perlu diarahkan melalui program pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebagai *khalifah fil ardhi*, anak didik diharapkan mampu mengimplementasi nilai-nilai pendidikan yang telah dimiliki untuk mengabdikan kepada-Nya.
- b. Fungsi Pengintegrasian (*the integrating function*)  
Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Dalam hal ini, orientasi dan fungsi kurikulum adalah mendidik anak didik agar mempunyai pribadi yang integral. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat, pribadi yang integrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.
- c. Fungsi Perbedaan (*the differentiating function*)  
Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didik. Pada prinsipnya, potensi yang dimiliki anak didik itu memang berbeda-beda dan peran pendidikanlah yang mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga

---

<sup>27</sup>Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 9.

anak didik dapat hidup dalam bermasyarakat yang senantiasa beraneka ragam namun satu tujuan pembangunan tersebut.<sup>28</sup> Jadi fungsi kurikulum sebagai pembeda dapat dimulai dengan memprogram kurikulum pendidikan yang relevan dan mengaplikasikannya dalam proses belajar-mengajar yang mendorong perbedaan anak didik tersebut dapat berpikir kreatif, kritis dan berorientasi kedepan.

d. Fungsi Persiapan (*The Propaedeutic Function*)

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh, baik itu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi maupun untuk belajar di masyarakat seandainya ia tidak mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

e. Fungsi Pemilihan (*the selective function*)

Dalam fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada anak didik dalam memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

f. Fungsi Diagnostik (*the diagnostic function*)

Salah satu aspek pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan anak didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan anak didik untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila anak didik sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahannya.

---

<sup>28</sup>M. Fadillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, 214.

## 6. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013

Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik
- c. Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi
- d. Kompetensi Inti dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara serta perkembangan global
- e. Standar Isi (SI) dijabarkan dari SKL
- f. Standar Proses dijabarkan dari SI
- g. Standar Penilaian dijabarkan dari SKL, SI, dan Standar Proses
- h. Kompetensi inti Lulusan dijabarkan kedalam Standar Inti
- i. Kompetensi Inti dijabarkan kedalam Kompetensi Dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran
- j. Kurikulum Satuan Pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan
- k. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotifasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
- l. Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk
- m. Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 81-82.

Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu. Pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif, pada awal pembelajaran guru tidak berusaha untuk memberi tahu siswa karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013 kegiatan inti dimulai dengan siswa mengamati fenomena atau fakta tertentu.

Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Pada metode proyek, pemecahan masalah, atau inkuiri siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Dianjurkan pula untuk materi tertentu siswa memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan masyarakat. Tentu dengan pendekatan ini pembelajaran tidak cukup dengan pelaksanaan tatap muka dalam kelas.

Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Pergeseran ini membuat guru tidak hanya menggunakan sumber belajar tertulis sebagai satu-satunya sumber belajar siswa dan hasil belajar siswa hanya dalam bentuk teks. Hasil belajar dapat diperluas dalam bentuk teks, desain program, *mind mapping*, gambar, diagram, tabel, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempraktikkan sesuatu yang dapat dilihat dari lisannya, tulisannya, gerakannya, atau karyanya.

Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi dari aktivitas dalam proses belajar. Yang dikembangkan dan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, mata pelajaran dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang

terpadu.<sup>30</sup> Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama, agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih.

Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi. Disini siswa belajar menerima kebenaran tidak tunggal. Contoh pembelajaran misalnya; Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten. Mereka akan melihatnya dari tempatnya berpijak. Jika ada sejumlah siswa yang melukiskan awan pada jam yang sama dari tempat yang berjauhan, mereka akan melukiskannya berbeda-beda, semua benar tentang awan itu, benar menjadi beragam. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pada waktu lalu pembelajaran berlangsung ceramah. Segala sesuatu diungkapkan dalam bentuk lisan guru, fakta disajikan dalam bentuk informasi verbal, sekarang siswa harus lihat faktanya, gambarnya, videonya, diagramnya, teksnya yang membuat siswa melihat, meraba, merasa dengan panca indranya. Siswa belajar tidak hanya dengan mendengar, namun dengan menggunakan panca indera lainnya.<sup>31</sup>

Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hard skills*) dan keterampilan mental (*soft skills*). Hasil belajar pada raport tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya, tetapi menyajikan informasi menyangkut perkembangan sikapnya dan keterampilannya. Keterampilan yang dimaksud bisa keterampilan membaca, menulis, berbicara, mendengar yang mencerminkan keterampilan berpikirnya. Keterampilan bisa juga dalam bentuk aktivitas dalam menghasilkan karya, sampai pada keterampilan berkomunikasi yang santun, keterampilan menghargai pendapat dan yang lainnya.

---

<sup>30</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, 82.

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, 83.

Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hal ini memerlukan guru untuk mengembangkan kebiasaan sejak dini untuk melaksanakan norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat, dalam ruang lingkup yang lebih luas siswa perlu mengembangkan kecakapan berpikir, bertindak, berbudi sebagai bangsa, bahkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global. Kebiasaan membaca, menulis, menggunakan teknologi, bicara yang santun merupakan aktivitas yang tidak hanya diperlukan dalam budaya lokal, namun bermanfaat untuk berkompetisi dalam ruang lingkup global.

Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*).<sup>32</sup> Disini guru perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan, memberi contoh bagaimana hidup selalu belajar, hidup patuh menjalankan agama dan perilaku baik lain. Guru di depan jadi teladan, di tengah siswa menjadi teman belajar, di belakang selalu mendorong semangat siswa tumbuh mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Oleh karena itu pembelajaran dalam kurikulum 2013 memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu dalam kelas.

Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas. Prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka.

---

<sup>32</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, 84.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Disini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni siswa dapat belajar dari siapa pun. Yang paling penting mereka harus dapat menguasai TIK sebab mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK atau tidak siswa tetap akan menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna TIK. Jika sekolah tidak memfasilitasi pasti daya kompetisi siswa akan *jomplang* daripada siswa yang memperoleh pelajaran menggunakannya.

Hakikat pembelajaran adalah “interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran (perubahan perilaku). Ada beberapa prinsip umum yang menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran (siswa dan guru) yaitu:<sup>33</sup>

Prinsip Umum, meliputi; 1) Bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen), 2) Peserta didik memiliki potensi, gandrung dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuhkembangkan, 3) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami sejalan dengan proses kehidupan.

Prinsip Khusus Pembelajaran, meliputi: 1) Prinsip perhatian dan motivasi, 2) Prinsip keaktifan, 3) Prinsip keterlibatan langsung/ berpengalaman, 4) Prinsip pengulangan, 5) Prinsip tantangan, 6) Prinsip balikan dan penguatan dan 7) Prinsip perbedaan individual.

## 7. Komponen-Komponen Kurikulum 2013

Pada hakikatnya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berangkat dari definisi itu, kurikulum tersebut setidaknya ada tiga komponen penting

---

<sup>33</sup> Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 182-187.

yaitu komponen tujuan pendidikan, komponen proses, dan komponen evaluasi.

Pada masa reformasi ini pendidikan lebih diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter unggul. Manusia Indonesia yang memiliki integritas. Ini tentu untuk merespon berbagai degradasi moral dan sosial seperti tindak korupsi yang semakin merajalela, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajaran, dan lain-lain. Selain tujuan pendidikan komponen lain yang harus ada dalam komponen kurikulum adalah proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran melibatkan banyak sub komponen seperti metode ataupun teknik pembelajaran, guru, buku ajar, dan kelengkapan pembelajaran yang lain.

Ada beberapa hal yang menjadi komponen dalam merencanakan implementasi kurikulum, diantaranya adalah:<sup>34</sup>

a. Rumusan Tujuan

Komponen ini membuat rumusan tujuan yang hendak dicapai atau yang diharapkan tercapai setelah pelaksanaan kurikulum, yang mengandung hasil-hasil yang hendak dicapai berkenaan dengan aspek-aspek deduktif, administratif, sosial dan aspek lainnya.

b. Identifikasi Sumber-sumber

Komponen ini memuat secara rinci sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum. Perlu dilakukan survey untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan meliputi sumber keterbacaan, sumber audio visual, manusia, masyarakat dan sumber di sekolah yang bersangkutan.

c. Peran Pihak-pihak Terkait

Komponen ini memuat tentang unsur-unsur ketenagaan yang bertindak sebagai pelaksanaan kurikulum, seperti tenaga kerja, supervisor, administrator serta siswa sendiri.

d. Pengembangan Kemampuan Profesional

---

<sup>34</sup> Imas Kurniasih & Berlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 (Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013)*, (tk: Kata Pena, 2014), 5-7.

Komponen ini memuat perangkat kemampuan yang dipersyaratkan bagi masing-masing unsur ketenagaan yang terkait dengan implementasi kurikulum.

e. Penjadualan Kegiatan Pelaksanaan

Komponen ini memuat uraian lengkap dan rinci tentang jadwal pelaksanaan kurikulum.

f. Unsur Penunjang

Komponen ini memuat uraian lengkap tentang semua unsur penunjang yang berfungsi menunjang pelaksanaan kurikulum. Unsur penunjang meliputi metode kerja, perlengkapan, biaya, dan waktu yang tersedia.

g. Komunikasi

Komponen ini direncanakan sistem dan prosedur komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum.

h. *Monitoring*

Komponen ini memuat secara rinci dan komprehensif tentang rencana kegiatan monitoring sejak awal dimulainya pelaksanaan kurikulum, pada waktu proses pelaksanaan dan tahap akhir pelaksanaan kurikulum.

i. Pencatatan dan Pelaporan

Komponen ini memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan pencatatan data dan informasi dan memuat laporan yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum.

j. Evaluasi Proses

Komponen ini memuat rencana evaluasi proses pelaksanaan kurikulum. Dalam rencana ini digambarkan hal-hal seperti tujuan, fungsi, metode evaluasi dan bentuk evaluasi.

k. Perbaikan dan Redesain Kurikulum

Dalam rencana ini perlu diestimasi kemungkinan dilakukan perbaikan kurikulum yang hendak dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan atas dasar umpan balik yang bersumber dari hasil evaluasi proses.

Komponen-komponen tersebut di atas yang secara sinergis menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Proses pembelajaran merupakan pusat segala upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional. Oleh sebab itu, seharusnya perhatian lebih dicurahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Namun

perhatian sepertinya belum optimal terbukti dengan masih banyaknya sekolah dengan sarana dan prasarana seadanya saja. Sementara itu, komponen terakhir dalam kurikulum adalah evaluasi. Implementasi kurikulum perlu dievaluasi untuk melihat capaian yang telah terlaksana.

## 8. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran menyentuh tiga ranah meliputi ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan). Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam pembelajaran diharapkan siswa mampu mencari tahu informasi dari berbagai sumber bukan hanya mendapatkan informasi dari guru saja.

Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran.<sup>36</sup>

### a. Mengamati (*observing*)

Mengamati (*observing*) adalah kegiatan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam kegiatan mengamati ini, guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk melakukan kegiatan mengamati, membaca, menyimak, mengobservasi serta mendengarkan. Sedangkan guru hanya memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan mengamati seperti ini bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan konteks situasi

---

<sup>35</sup> Abdul Majid dan Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 70.

<sup>36</sup> Abdul Majid dan Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2013*, 75.

nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik akan memiliki kebermaknaan yang tinggi.

b. Menanya (*questioning*)

Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses membangun pengetahuan siswa dalam bentuk konsep, prinsip, prosedur, hukum dan teori hingga berpikir metakognitif. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi secara kritis, logis, dan sistematis.<sup>37</sup>

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan dari pengamatan dan pertanyaan diberikan dapat menggiring siswa untuk melakukan pengamatan yang lebih teliti. Selain itu, pertanyaan dapat diajukan oleh siswa setelah mempelajari konsep yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula guru memberikan bimbingan terhadap siswa dalam belajar. Kegiatan menanya dapat dilakukan dalam proses kegiatan diskusi kelompok. Dalam memberikan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran, ada beberapa kriteria pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan harus singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat probing atau divergen, memberi kesempatan siswa untuk berpikir ulang, merangsang peningkatan tuntutan kebutuhan kognitif, dan merangsang proses interaksi.

c. Mencoba (*experimenting*)

Langkah selanjutnya dalam *saintific approach* adalah mencoba. Kegiatan belajarnya adalah melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan narasumber. Pada langkah pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mencoba mempraktikkan apa yang dipelajari. Dalam kegiatan ini, siswa boleh mendapatkan informasi dari manapun seperti membaca buku di perpustakaan, internet,

---

<sup>37</sup> Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 47.

melakukan eksperimen maupun diskusi kelompok. Dengan cara ini siswa diharapkan akan memperoleh banyak informasi dari manapun. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan serta mampu mengembangkan kreatifitas siswa.

d. Menalar (*associating*)

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.<sup>38</sup> Kegiatan belajarnya adalah; *Pertama*, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. *Kedua*, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat penambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber, dari yang berpendapatberbeda sampai kepada yang bertentangan.<sup>39</sup>

Informasi yang dikumpulkan siswa merupakan hasil dari kegiatan yang diamati dan kegiatan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dengan banyaknya informasi yang diperoleh, sehingga akan mempermudah siswa dalam mengambil kesimpulan. Dalam kegiatan penalaran ada dua cara menalar yang digunakan, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dari fenomena atau atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik kesimpulan dari pernyataan atau fenomena dari yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus.<sup>40</sup>

Kegiatan penalaran dilakukan oleh guru dengan tujuan agar siswa mampu membangun kemampuan berpikir ilmiah. Mengkomunikasikan Pada kegiatan akhir, siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan

---

<sup>38</sup> Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif*, 85

<sup>39</sup> M. Hosnan, *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 68.

<sup>40</sup> Abdul Majid dan Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2013*, 88.

hasil pekerjaan yang telah disusun secara individual maupun kelompok. Kegiatan mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik.<sup>41</sup>

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui cerita maupun pajangan hasil temuan dalam kegiatan mencari informasi kemudian disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru. Mengkomunikasikan juga dapat dilakukan dalam bentuk artikel maupun video melalui media digital. Pemahaman siswa akan semakin bertambah dengan adanya penguatan dari guru.

## **B. Implementasi Kurikulum 2013**

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan terarah, perubahan ini harus memiliki visi dan arah yang jelas akan dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan perubahan kurikulum tersebut.

Kurikulum yang telah dirancang dengan sempurna tidaklah berarti jika tidak diterapkan. Kurikulum diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan yang ada di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kurikulum akan diimplementasikan di sekolah dalam rangkaian proses pembelajaran. Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pengembangan program berkaitan dengan kegiatan menyusun rancangan kurikulum. Kegiatan menerapkan rancangan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berupa kegiatan untuk menilai proses pembelajaran.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif*, 48.

<sup>42</sup> Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 235.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi (*outcome-based curriculum*) oleh karena itu pengembangannya dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Dalam konstruk dan isinya Kurikulum 2013 mementingkan terselenggaranya proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Proses belajar yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dengan penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Struktur Kurikulum terdiri dari Kompetensi Inti yaitu: 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual, 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial, 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi pengetahuan, dan 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi keterampilan.

Dalam upaya mensukseskan implementasi kurikulum 2013, penting untuk peningkatan keteladanan akhlak mulia dan kompetensi pendidik. Kurikulum 2013 memiliki tujuan dalam hal pembentukan karakter akhlak mulia peserta didik. Pendidik sebagai ujung tombak bagi pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik dapat menanamkan akhlak mulia melalui pembiasaan dan penerapan akhlak mulia.<sup>43</sup>

Implementasi kurikulum sebagai operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Implementasi kurikulum sebagai upaya guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana pembelajaran.<sup>44</sup> Jadi implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan dari ide, program, dan rancangan kurikulum yang masih bersifat tertulis sebagai bahan pedoman bagi guru ke dalam aktivitas/tingkah laku nyata pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum. Adapun Implementasi Kurikulum 2013 menjadi hal yang baru bagi dunia pendidikan Indonesia setelah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

---

<sup>43</sup> Asiyah, *Peningkatan keteladanan akhlak mulia dan kompetensi pendidik dalam menyongsong implementasi kurikulum 2013. Prosiding seminar nasional dan temu alumni "peran pendidikan dalam pembangunan karakter bangsa"*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 421.

<sup>44</sup> A. Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), 7.

(KTSP)/Kurikulum 2006. Mulai Tahun Ajaran 2013/2014 diberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas di sekolah-sekolah pilotting yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai sebuah kurikulum baru, pelaksanaan kurikulum 2013 ini tentunya membawa konsekuensi yang berbeda bagi pelaksana kurikulum di sekolah.

Pelaksanaan setiap kurikulum baru akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru karena guru harus menyesuaikan kompetensinya dan juga kepercayaan dirinya dalam penggunaannya. Hal tersebut hanya berlaku jika kurikulum baru tersebut benar-benar diterima oleh guru di sekolah.

Dalam implementasi Kurikulum 2013 harus berbasis pada prinsip manajemen kurikulum sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Implementasi kurikulum sebagai perwujudan kerjasama antar tingkatan pemerintah dari pusat hingga daerah.
- b. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah serta melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- c. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum.
- d. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi kurikulum adalah kegiatan mempraktikkan atau menerapkan suatu ide, program atau seperangkat kegiatan yang baru untuk individu atau organisasi yang menggunakan kurikulum, di mana implementasi kurikulum tersebut mencakup tiga kegiatan pokok yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dalam implementasi kurikulum 2013 adalah ketidaksiapan kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan seperti belum adanya buku penunjang yang sesuai, sarana dan prasarana yang belum memadai di setiap sekolah, kesulitan guru mendapatkan informasi lengkap terkait

---

<sup>45</sup> Kemendikbud, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SD Kelas IV*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, 2013), 92.

penerapan 2013 dan mengubah cara belajar siswa yang memerlukan adaptasi yang sesuai dengan kurikulum ini. Adapun faktor pendukung implementasi kurikulum 2013 adalah cukup tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran serta aktifitas siswa itu sendiri juga menjadi faktor pendukung bilamana kegiatan tersebut dikemas dengan tepat sesuai dengan tujuan kurikulum dan juga memprioritaskan pembentukan karakter siswa.<sup>46</sup> Oleh karena itu, guru sebaiknya bersikap pro aktif terhadap program-program yang berkaitan dengan implementasi kurikulum seperti lebih sering lagi mengikuti seminar dan pelatihan tentang kurikulum 2013. Seminar dan pelatihan ini diharapkan berisi sosialisasi dan praktik secara langsung mengenai kurikulum 2013 bukan hanya secara umum tetapi juga mencakup hal-hal yang khusus juga. Disisi lain sosialisasi harus diikuti dengan seminar dan pelatihan guru mengenai peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis informasi dan teknologi, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang efektif. Sebaiknya guru lebih berani untuk menerapkan metode media dan sumber belajar yang bervariasi meskipun karakteristik siswa masih terbiasa dengan cara metode belajar ceramah 1 arah. Bila hal ini dilakukan terus menerus akan mengubah kebiasaan dan karakteristik siswa untuk lebih siap dengan model pembelajaran pada kurikulum 2013. Sekolah sebaiknya memfasilitasi baik dari segi sarana dan prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia tenaga akademik agar mampu mendukung penerapan kurikulum 2013 secara optimal.

## C. Mutu Pendidikan

### 1. Pengertian Mutu Pendidikan

Beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh Abdul Hadis, dan Nurhayati, dalam Manajemen Mutu Pendidikan menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Juran, mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu: (1) teknologi; yaitu kekuatan, (2) psikologis; yaitu rasa atau

---

<sup>46</sup><http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomi-pembangunan/article/view/35621>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.

- status, (3) waktu; yaitu kehandalan, (4) kontraktual; yaitu ada jaminan, (5) etika; yaitu sopan santun.
- b. Menurut Crosby, mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau yang distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu telah ditentukan, standar mutu meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.
  - c. Menurut Deming, mutu ialah kesesuaian kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa.
  - d. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan.
  - e. Goetsch dan Davis menyatakan *Quality is a dynamic states associated with products, servis, people, processes, and environments that meets or exceeds expectation and helps produce superior value*.<sup>47</sup> Mutu ialah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.<sup>48</sup>

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun yang *intangible* (tidak dapat dipegang).

---

<sup>47</sup> Graeme Knowles, *Quality Management*, (Jakarta: ISBN, 2011), 10.

<sup>48</sup> Abdul Hadis & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 84-85.

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achivement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Dari beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Menurut Sallis dalam Thomas mengatakan bahwa mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.<sup>49</sup> Menurut Marus Suti, mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu berdasarkan pertimbangan intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan secara ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes.<sup>50</sup>

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa mutu pendidikan ialah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni, atau

---

<sup>49</sup> Thomas Partono, “Faktor Determinan Produktivitas Sekolah”, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 17 Nomor 1*, (2013): 3.

<sup>50</sup> Marus Suti, “Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal MEDTEK, Volume 3 Nomor 2* (2011): 5.

keterampilan. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku.<sup>51</sup> Ada banyak pendapat mengenai kriteria mutu pendidikan. Mutu pendidikan menurut standar nasional pendidikan adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi moral pengetahuan maupun kompetensi kerja.

Mutu pendidikan merupakan sebuah konsep yang kontradiktif sebab disatu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolut dan di sisi lain bisa diartikan konsep yang relatif. Sebagai konsep yang absolut, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat diungguli. Sedangkan mutu yang bersifat relatif ialah mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Mutu merupakan produk konseptual yaitu apa yang dianggap sekarang belum tentu besok bisa dianggap bermutu sehingga perlu adanya perbaikan terus menerus. Secara etimologi, mutu telah didefinisikan secara beragam, Edward Dening mendefinisikan mutu sebagai “kesesuaian dengan kebutuhan pasar”. Dari definisi ini, Armand V. Feigenbaun mengatakan ukuran relatif dari suatu produk atas jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifik produk dan mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan berbagai macam pengertian mutu tersebut maka manajemen mutu berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses, dan sumber daya manusia. Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu,

---

<sup>51</sup> Achmad Dedy, “Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung”, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 12, no. I (2011): 5.

yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu.<sup>52</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan bukan ditentukan dari lembaga penyelenggara pendidikan tetapi mutu pendidikan adalah spesifikasi yang dikehendaki dan kesesuaian dengan apa yang menjadi pandangan serta harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan keseluruhan penunjang mutu pendidikan, yaitu input, proses, sehingga akan menghasilkan kualitas *output* mutu pendidikan yang tinggi. Indikator sekolah bermutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*.
- 2) Sesuai dengan penggunaan atau *fitness for purpose or use*.
- 3) Produk tanpa cacat atau *zero defect*.
- 4) Sekali benar dan seterusnya atau *right first every time*.

Dalam konteks pendidikan nasional maka keempat indikator mutu tersebut diatur dalam SNP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2013 yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar penilaian pendidikan. Sedangkan indikator mutu pendidikan menurut spesifikasi *customer* ialah:

- 1) Kepuasan pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan pelanggan.
- 2) Setia kepada pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan.

Pelanggan sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa maka indikator kepuasan pengguna dapat dilihat dari penampilan, respons, handal, keyakinan, empati. Indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah,

---

<sup>52</sup> Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 320-321.

implementasi kurikulum, sistem penilaian dan komponen lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bersama guru, kepala sekolah, staf sekolah dan lain sebagainya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jadi mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus mampu menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya. Salah satu bentuk tertib administrasi adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Dilihat dari perspektif operasional, manajemen sekolah berbasis dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena ada beban atau karena diawasi secara ketat. Proses pekerjaannya pun dilakukan

benar dari awal, bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena kekeliruan yang tidak disengaja.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pendidikan Bermutu

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
- b. Ketidak mampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- c. Peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjasama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
- d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
- e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru

---

<sup>53</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah; dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 53.

akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.

- f. Para profesional pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
- g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.
- h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- i. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat.<sup>54</sup>

Edward Deming telah mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengkaitkannya dalam kelangsungan hidup bisnis. Hal ini didasarkan pada kegiatan yang dilakukan di Sekolah

---

<sup>54</sup> Nana Syaodih Sukmadinata Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah; Konsep, Prinsip, dan Instrument*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 9-11.

Menengah Kejuruan Teknik Region 3 di Lincoln, Maine dan Soundwell College di Bristol, Inggris, kedua sekolah ini dapat mencapai sasaran yang sudah digariskan dalam prinsip-prinsip tersebut dan mampu memperbaiki out come dan administrative. 14 prinsip itu adalah:

- a. Menciptakan konsistensi tujuan, untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.
- b. Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang mesti mengikuti prinsip-prinsip mutu.
- c. Mengurangi kebutuhan pengujian, dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang lebih menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
- d. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan, pandang sekolah sebagai pemasok siswa, bekerja dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu pendidikan.
- e. Memperbaiki mutu dan produktifitas serta mengurangi biaya, gambarkan proses memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai kostumer, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, implementasikan perubahan, nilai dan ukur hasilnya serta standarisasikan proses.
- f. Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan.
- g. Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan serta mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip mutu.
- h. Mengeliminasi rasa takut, hilangkanlah rasa takut dalam bekerja, dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah.
- i. Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya
- j. Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang menggambarkan tanggung jawab pada orang.
- k. Perbaikan proses.

- l. Membantu siswa berhasil, hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru dan administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya.
- m. Komitmen, manajemen mesti memiliki budaya mutu.
- n. Tanggung jawab, biarkan setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu.

### 3. Indikator Mutu Pendidikan

Dalam pengelolaan sekolah yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh kesungguhan dalam peningkatan mutu, berjangka panjang (*human investment*) dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Komitmen tersebut harus didukung oleh dedikasi yang tinggi terhadap mutu melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat. Ketika aspek-aspek dan indikator pengelolaan pendidikan dapat dijalankan dan diarahkan ke sebuah mutu yang tinggi, maka keberhasilan dari pencapaian mutu tersebut harus merupakan integrasi dari semua keinginan dan partisipasi *stakeholder* (semua yang berkepentingan) dalam pencapaian hasil akhirnya.<sup>55</sup>

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan misalnya tes tertulis, kala sikap.<sup>56</sup> Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu. Sedangkan prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademik atau prestasi non akademik.

Proses pembelajaran sekarang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan. Adanya perkembangan dan kemajuan ini tidak lepas dari adanya tuntutan yang begitu mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang ada saat ini dinilai masih belum sepenuhnya

---

<sup>55</sup> Amri Sofan, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar & Menengah dalam Teori Konsep dan Analisis*, (Jakarta: PT. Prestasi Putrakarya, 2013), 18.

<sup>56</sup> Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator Cara Mengukur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, (Bandung: Sindo, 1994), 390.

menggembirakan sebagaimana yang diharapkan bersama. Untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang konsep kualitas atau mutu, penjelasan awal tentang pengertian kualitas atau mutu akan disajikan pada bagian ini.

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Untuk menentukan bahwa pendidikan bermutu atau tidak dapat terlihat dari indikator-indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan menurut Sallis dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan (*service provider*) dan siswa sebagai pengguna jasa (*customer*) yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat dan *stakeholder*.

Indikator mutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari *output* lembaga pendidikan tersebut. Indikator itu adalah:<sup>57</sup>

- a. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*;
- b. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau *fitness for purpose or use*;
- c. Produk tanpa cacat atau *zero defect*;
- d. Sekali benar dan seterusnya atau *right first, every time*.

Indikator mutu dari perspektif *customer* adalah:

- a. Kepuasan pelanggan atau *customer satisfaction*. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau *exceeding customer expectation*;
- b. Setia kepada pelanggan atau *delighting the customer*.

---

<sup>57</sup> Edward Sallis, Total Quality Management in education, Manajemen Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: IRCISod, 2011), 56.

Sedangkan beberapa indikator yang untuk menentukan mutu dan kualitas sekolah menurut Sagala diantaranya:<sup>58</sup>

- a. Efektifitas proses pembelajaran yang lebih menekankan internalisasi pengembangan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan kemandirian.
- b. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sasaran melalui program yang dilaksanakan secara terencana.
- c. Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif, guru dituntut untuk mempunyai kreatifitas dan keluwesan dalam mengelola proses pembelajaran, untuk menjadikan peserta didik aktif, kreatif melalui pengembangan kompetensi. Sedangkan tenaga kependidikan menjadi pelayan teknis yang mampu mersepon isu-isu pendidikan.
- d. Sekolah memiliki budaya mutu.
- e. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.
- f. Sekolah memiliki kemandirian yaitu kemampuan dan kesanggupan kerja secara maksimal dengan tidak selalu bergantung pada petunjuk atasan.
- g. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang dilandasi rasa saling memiliki dan rasa tanggung jawab melalui loyalitas dan dedikasinya sebagai *stakeholders*.
- h. Sekolah memiliki transparansi dalam pengelolaannya.
- i. Sekolah memiliki kemauan perubahan.
- j. Sekolah melakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan dan merupakan proses penyempurnaan dalam peningkatan mutu keseluruhan.
- k. Sekolah memiliki *akuntabilitas sustainabilitas*.
- l. Output sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri, dan memenuhi syarat pekerjaan, yang sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, baik, ramah, sopan, benar, jujur, tawa serta kreatif, aktif, inovatif, saling mengingatkan, saling menyayangi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in education, Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCISod, 2011), 56.

<sup>59</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in education, Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCISod, 2011), 70.

Sedangkan indikator pendidikan yang bermutu menurut Nurdin adalah:

- a. Hasil akhir pendidikan, yang merupakan tujuan akhir pendidikan. Dari hasil tersebut para lulusan dapat bekerja atau diterima melanjutkan studi di lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Hasil langsung pendidikan, yang dapat berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- c. Proses pendidikan, merupakan interaksi antara *raw input*, *instrumental input* dan lingkungan guna mencapai tujuan pendidikan.
- d. *Instrumental input*, yang terdiri dari tujuan pendidikan, guru, sistem penyampaian, evaluasi serta bimbingan dan penyuluhan.
- e. *Raw input* (siswa) dan lingkungan.<sup>60</sup>

#### 4. Standar Mutu Pendidikan

Selanjutnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 2 ayat 1) dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 8 (delapan) standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:<sup>61</sup>

##### a. Standar Isi

Sesuai pasal 5 ayat 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

---

<sup>60</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in education, Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCISod, 2011), 79-80.

<sup>61</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* (pasal 2 ayat 1)

b. Standar Proses.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

c. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sesuai Pasal 28 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

e. Standar Sarana dan Prasarana.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Adapun biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada

gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta keberadaan bangsa yang bermartabat.

Dari kedelapan standar di atas, hanya ada 5 (lima) standar yang ada hubungannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar penilaian pendidikan.

Delapan standar nasional pada akhirnya akan bermuara pada suatu tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah mewajibkan setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana serta memiliki target dan kerangka waktu yang jelas agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan.

Sebuah sistem pendidikan meniscayakan adanya sebuah evaluasi guna mengontrol kinerja satuan pendidikan, sehingga dengan adanya fungsi kontrol tersebut tingkat efektivitas, produktivitas, berhasil dan gagalnya sistem pendidikan dapat dipantau. Sebagaimana tercantum dalam Bab XII pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Disamping ikut serta dalam proses evaluasi kinerja pendidikan, pemerintah juga berwenang dalam melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Yang dimaksud akreditasi disini adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh BAN-S/M (pada jenjang pendidikan dasar dan menengah).

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor eksternal meliputi partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak pada pendidikan, sosial budaya, serta rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi.<sup>62</sup>

Dalam peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh input dan faktor proses manajemen pendidikan. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. *Input* pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah menurut Subagio terdiri dari *man, money, policy*.<sup>63</sup> Dari pengertian di atas maka input pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi mutu dapat berupa:

- a. Sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah terdiri dari:
  - 1) Kepala sekolah merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala.
  - 2) Guru merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

---

<sup>62</sup> Syarifudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 14.

<sup>63</sup> Subagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002), 22.

b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran.<sup>64</sup>

c. Kesiswaan

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan siswa berdasarkan pada kriteria yang jelas transparan dan akuntabel.

d. Pembiayaan

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah pembiayaan pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola secara transparan.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, setiap program mutu harus memperhatikan empat komponen penting, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Adanya komitmen untuk berubah, baik dari anggota dewan sekolah maupun para administrator. Meskipun perubahan itu sering kali menjadi momok yang menakutkan, namun dengan adanya komitmen untuk berubah akan dapat membantu dalam mengurangi ketakutan pada orang-orang di lingkungan/wilayah lembaga pendidikan. Meski pula proses awal perubahan atau penerapan mutu tersebut banyak mengalami kendala, namun proses pembelajaran yang diperoleh dari kegagalan demi kegagalan itu akan menuju kesuksesan yang diharapkan. Tentunya kesuksesan ini dapat menjadikan daya saing dan daya tawar lembaga/sekolah yang semakin kompetitif.

---

<sup>64</sup> Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 22.

<sup>65</sup> Jerome Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*, Penerjemah Yosol Irianta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 7.

- b. Adanya pemahaman yang baik tentang di mana keberadaan sekolah atau wilayah kita sekarang. Artinya usaha perubahan yang sudah dicanangkan langgeng dan berhasil, harus diketahui dahulu bagaimana sistem yang berjalan saat ini.
- c. Adanya visi masa depan yang jelas dan dipegang oleh semua orang di lembaga/sekolah tersebut. Dengan visi itulah lembaga pendidikan akan dituntun dan diarahkan agar tetap fokus dan berkomitmen dalam program mutu tersebut.
- d. Adanya rencana implementasi mutu di lembaga/sekolah. Rencana tersebut harus menjadi pedoman dalam proses implementasi yang secara kontinyu senantiasa diperbaharui sebagai ciri perubahan, karena program mutu tidaklah pernah stagnan.

## **6. Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan**

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah, memerlukan perencanaan strategis dalam menciptakan perubahan-perubahan yang berarti dalam mendongkrak mutu pendidikannya. Sekolah atau madrasah dalam praktik manajerial harus dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan strategis dan anggaran yang dimiliki oleh sekolah.

Sekolah atau madrasah dalam konteks manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat, yayasan maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jalinan komitmen antara sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga harapan dan keinginan masyarakat dapat direspons dengan baik oleh sekolah. Setiap sekolah atau madrasah hendaknya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, jika disertai dengan pembuatan rencana yang matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana inilah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam

membuat kerangka kerja dan meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien.<sup>66</sup>

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan salah satu jawaban yang dapat dilaksanakan dalam konteks pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah wajib diketahui, dihayati, dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah ini diperlukan strategi yang bisa diterapkannya. Strategi yang dimaksudkan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Komitmen kepala sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Komitmen yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sebab tanpa adanya komitmen yang tinggi sangat mustahil perubahan dan pemberdayaan ini bisa dilaksanakan dengan baik.

b. Membentuk *teamwork* sebagai penggerak mutu

Kepala sekolah atau madrasah dalam menjalankan kepemimpinannya harus mampu memberdayakan seluruh sumber daya potensial yang dimilikinya dan harus didukung oleh *teamwork* yang bagus dan mempunyai komitmen yang tinggi. Keberadaan *teamwork* dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah menjadi penting adanya karena kepala sekolah

---

<sup>66</sup> Prim Masrokhon Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), 165.

<sup>67</sup> Prim Masrokhon Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), 167-177.

tidak akan mungkin bisa menjalankan mutu dengan sendirinya.

- c. Merumuskan visi dan misi sekolah/ madrasah berbasis pada mutu

Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau ke depan. Visi merupakan harapan dan impian yang dimiliki sekolah atau lembaga pendidikan tentang apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, visi sekolah harus dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, harapan dan keinginan masyarakat dan *stakeholder* pendidikan serta memuat cita-cita yang luhur. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi (sekolah atau madrasah) bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, misi adalah penjelasan realitas yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi.

- d. Membuat evaluasi diri (*self-evaluation*)

Membuat evaluasi diri secara objektif terhadap kondisi sekolah atau madrasah yang sebenarnya merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh kepala sekolah sebelum membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan di lembaganya. Evaluasi diri dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kekuatan, kelemahan internal sekolah itu sendiri, serta untuk mengetahui peluang dan tantangan yang harus dicapai oleh sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

- e. Membuat perencanaan sekolah atau madrasah berbasis pada mutu

Perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Membuat perencanaan sekolah atau madrasah yang baik dan strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan pelaksanaan fungsi pertama dalam

manajemen. Fungsi ini harus dijalankan oleh sekolah dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

- f. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan program-program mutu

Pelaksanaan program mutu yang telah direncanakan oleh sekolah akan dapat menentukan hasil yang ingin dicapai. Hebatnya perencanaan yang telah dibuat tidak mungkin bisa berhasil dengan baik, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur mutu yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan perencanaan yang sudah menjadi kebijakan kepala sekolah, perlu memberdayakan seluruh sumber daya potensial yang dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Pemberdayaan ini merupakan alat yang sangat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi sekolah melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab.

- g. Melaksanakan kontrol manajerial dalam pengendalian mutu kinerja

Melaksanakan kontrol manajerial dan evaluasi dalam peningkatan mutu kinerja merupakan usaha yang harus dilaksanakan oleh sekolah atau madrasah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terakhir. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meyakinkan apakah program-program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sejauh mana tujuan telah dicapai, dan jika belum apa yang menjadi pengambatnya.

- h. Melaksanakan perbaikan secara terus-menerus (*Continuous quality improvement*)

Perbaikan secara terus-menerus akan bisa berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha untuk menempatkan sumber daya manusia yang tepat. Faktor manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Untuk melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan, kepala sekolah dan teamwork harus selalu berkoordinasi dan mengkaji hambatan-hambatan yang dialaminya serta mampu membaca peluang dan mempersiapkan strategi untuk meraih peluang dengan sebaik mungkin. Dalam konteks ini, kepala sekolah

harus secara aktif mendorong kepada setiap individu untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan agar bisa memperoleh hasil yang terbaik dalam setiap proses kegiatan dan pemberdayaan yang ada di sekolah atau madrasah.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah;
- b. Menjamin mutu lulusannya
- c. Bekerja lebih profesional
- d. Meningkatkan persaingan yang sehat

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Dimana terdapat delapan standar yang menjadi kriteria minimal yang menjadi indikator mutu pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang relevan dengan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan penelitian diantaranya:

1. M. Arif Khoirudin, (2013), dalam penelitiannya berjudul *Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Manajemen kurikulum merupakan kegiatan pengaturan. yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi agar proses pendidikan dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya lima prinsip yang harus menjadi perhatian penting, yaitu: 1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus

---

<sup>68</sup> Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 51.

dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. 5) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.<sup>69</sup>

2. Sri Intan Wahyuni, (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Tahun Pelajaran 2008/ 2009). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Implementasi manajemen kurikulum di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta meliputi: landasan dan tujuan manajemen kurikulum yaitu KTSP dan Permendiknas tahun 2007, perencanaan kurikulum PAI yaitu penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan kurikulum PAI yaitu pada tingkat sekolah dan tingkat kelas yang dikembangkan oleh masing-masing guru PAI, dan penilaian kurikulum PAI yang dilakukan setelah proses belajar mengajar dan pada akhir semester melalui ujian akhir semester dan ujian nasional. 2) Manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI dengan melihat beberapa prinsip diantaranya prinsip relevansi yaitu kurikulum memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, prinsip fleksibilitas yaitu program pembelajaran yang terencana dilaksanakan secara fleksibel selama proses belajar mengajar,

---

<sup>69</sup> M. Arif Khoirudin, “Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 24 Nomor 1, (2013).

prinsip kontinuitas yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara berkesinambungan, prinsip efisiensi yaitu proses belajar mengajar dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan prinsip efektivitas yaitu manajemen kurikulum PAI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum dapat membawa hasil yang berguna bagi madrasah.

3. Lismawati, (2016), dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 5 Jakarta*. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Konteks dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 5 sudah jelas visi, Misi dan tujuannya. 2) Input dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 5 masih kurang control yang baik. Dilihat dari input guru dan karyawan masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan profesinya, begitu pun input karyawannya belum sesuai dengan profesi lulusannya. 3) Proses dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 5 sudah baik karena sudah sesuai dengan prosedur Kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah baik dalam prosedur pengajaran maupun dalam prosedur pengadministrasian. 4) Produk dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 5 masih belum ada baik di bidang akademik maupun non akademik.<sup>70</sup>
4. Octaviansyah, Tandiyo Rahayu, Oktia Woro Kasmini Handayani, (2015), dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Palembang*. Berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan simpulan bahwa implementasi kurikulum 2013 meliputi standar isi memperoleh rata-rata persentase sebesar 80,1%, standar proses memperoleh rata-rata sebesar 80,7%, dan standar penilaian memperoleh rata-rata persentase sebesar

---

<sup>70</sup> Lismawati, "Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 Pada Pelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 5 Jakarta", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 7 nomor 2 (2016).

79,7% yang termasuk dalam kategori sesuai. namun dari setiap indikator masih perlu dilakukan perbaikan dikarenakan masih terdapat kendala ataupun kesulitan yang dialami guru terkait 3 standar yang mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya.<sup>71</sup>

5. KM Manik Riptiani, I.B. Surya Manuaba, Made Putra, (2015), dalam penelitiannya yang berjudul *Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Ditinjau dari CIPP pada Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Pedesaan Kabupaten Badung*. Hasil penelitiannya bahwa implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari CIPP pada Sekolah Dasar Negeri di wilayah pedesaan Kabupaten Badung tergolong kurang efektif.<sup>72</sup>
6. Elwien Sulistya Ningrum dan Ahmad Yusuf Sobri, (2016), dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*. Adapun hasil penelitiannya adalah Implementasi Kurikulum 2013 di SDN Tangkil 01 Wlingi yang melakukan proses penyusunan kurikulum yaitu pemerintah karena Kurikulum 2013 masih baru sehingga pemerintah sering memberikan sosialisasi terkait implementasi Kurikulum 2013 kepada kepala sekolah dan guru. Pendanaan untuk implementasi Kurikulum 2013 di SDN menggunakan dana dari BOS dan juga LPMP serta buku yang digunakan pada proses pembelajaran diperoleh dari pemerintah sehingga sekolah tidak menghimpun dana dari orang tua peserta didik. Guru menggunakan promes sebagai pedoman dalam mengajar yang dibuat berdasarkan silabus dan dalam implementasi Kurikulum 2013 guru melakukan penilaian berupa penilaian portofolio, rubrik penilaian, penilaian diri, dan juga tugas serta ulangan harian yang kemudian dari penilaian-penilaian tersebut guru bisa memberikan penilaian untuk mengisi rapor yang berupa

---

<sup>71</sup> Octaviansyah, Tandiyo Rahayu, Oktia Woro Kasmini Handayani, “Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Ditinjau dari CIPP pada Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Pedesaan Kabupaten Badung”, *Journal of Physical Education and Sports*, (2015).

<sup>72</sup> KM Manik Riptiani, I.B. Surya Manuaba, Made Putra, “Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Ditinjau dari CIPP pada Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Pedesaan Kabupaten Badung”, *Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3 nomor 1, (2015).

deskripsi dari kemampuan yang dimiliki dari masing-masing peserta didik.<sup>73</sup>

Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian di atas bahwa penelitian ini menekankan pada evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan M. Arif Khoirudin yang hanya menekankan pada manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan, Lismawati lebih menekankan pada Evaluasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2013 pada pelajaran Al-Islam di SD. Octaviansyah, Tandiyu Rahayu, Oktia Woro Kasmini Handayani juga hanya menekankan pada evaluasi implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama Negeri, KM Manik Riptiani, I.B. Surya Manuaba, Made Putra dalam penelitiannya lebih menekankan evaluasi implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari CIPP pada Sekolah Dasar Negeri. Elwien Sulistya Ningrum dan Ahmad Yusuf Sobri dalam penelitiannya juga hanya menekankan pada implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan arah dan maksud penelitian. Kurikulum 2013 ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran.

Dalam Kurikulum 2013 terjadi perubahan meliputi beberapa hal diantaranya isi dan jumlah serta jam mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan, perubahan pada isi bahan ajar, buku pegangan yang digunakan, penambahan jam

---

<sup>73</sup> Elwien Sulistya Ningrum dan Ahmad Yusuf Sobri, "Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 24 nomor 5 (2015).

pelajaran dan penggunaan pendekatan saintifik pada pembelajaran. Guru harus mampu menerapkan Kurikulum 2013 secara tepat dalam proses pembelajaran dan *impact*-nya serta penilaian agar mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk menghasilkan mutu pendidikan serta lulusan yang mampu menghadapi tantangan global. Namun dalam kenyataannya implementasi Kurikulum 2013 ini belum sepenuhnya lancar. Terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penerapan Kurikulum 2013 ini, tak terkecuali dalam implementasi Kurikulum 2013 di MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

